

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1), dan (2), dinyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah Kabupaten/Kota di

bagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/ atau Desa. Pembentukan daerah tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat dasar dan syarat administratif. Bagaimanapun suatu proses politik harus diletakkan pada nilai yang paling luhur, yaitu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik”

Tujuan pemberian Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi penghidupan.

Masalah pengangguran telah menjadi hal yang urgen yang begitu menakutkan khususnya di daerah-daerah yang baru berkembang seperti kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah pencari kerja yang cukup besar di Kabupaten Tanah Datar , serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja bagi para pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup tentang pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan hubungan industrial.

Menurut Muslim (2014) “menjelaskan, bahwa:pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami”. Sedangkan menurut Menurut Pitartono (2012), Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara Internasional, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi daerah otonom sejak tahun 1956 dan diatur dalam Undang-undang no 12 tahun 1956. Meskipun sudah menjadi daerah otonom, masih banyak terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran. Pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari penambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius

Menurut Seran (2017) faktor-faktor mempengaruhi terjadinya pengangguran adalah: 1.) Tingkat upah yang rendah. 2.) Ketidak cocokan antara

kemampuan pekerja yang diminta dengan kemampuan yang ada. 3.) Faktor tempat tinggal, akses pekerja dikota lebih besar dibandingkan di desa terhadap informasi lapangan kerja. 4.) Kurangnya permintaan efektif, yang berpotensi menimbulkan pengangguran karena cenderung mengurangi keuntungan perusahaan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesempatan kerja atau usaha yang sedikit. Oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yang merupakan proporsi penduduk yang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 01 Tingkat Pengangguran terbuka Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017-2018 di Kabupaten Tanah Datar**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	
		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	2983	3211
2	Perempuan	3682	2275
3	Laki-laki dan Perempuan	6665	5486

*Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar*

Dengan melihat tabel 01 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2018-2019 masih tinggi. Data ini diambil dari badan pusat statistik Kabupaten Tanah Datar yaitu jumlah pengangguran di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2019. Dimana jumlah pengangguran laki-laki ditahun 2018 adalah 2.983 orang, sedangkan ditahun 2019 adalah 3.211 orang, sedangkan jumlah pengangguran perempuan ditahun 2018 adalah 3.682 orang, sedangkan ditahun 2019 adalah 2.275 orang.

Disini dapat disimpulkan jumlah pengangguran laki-laki dari tahun 2018 ke 2019 cenderung meningkat dari 2.983 orang ditahun 2018 menjadi 3.211 orang ditahun 2019. Justru sebaliknya jumlah pengangguran perempuan menurun dari tahun 2018 ke 2019 dari 3.682 orang ditahun 2018, menjadi 2.275 orang ditahun 2019.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar masih tinggi
2. Pertumbuhan Penduduk masih tinggi di Kabupaten Tanah Datar
3. Angka Pengangguran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di Kabupaten Tanah Datar
4. Terjadinya peningkatan angka pengangguran laki-laki dari tahun 2018-2019 di Kabupaten Tanah Datar
5. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kabupaten Tanah Datar.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan peneliti yang terbatas maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Terjadi kecenderungan naik atau turunnya angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar
2. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kabupaten Tanah Datar
3. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Tanah Datar

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti dengan maksud untuk menghindari kesalahan penafsiran dan lebih mengenai sasaran, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak Otonomi Daerah terhadap Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pertumbuhan lapangan pekerjaan sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tindakan pemerintah Daerah dalam mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya kenaikan/penurunan angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengangguran di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui apa solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi angka pengangguran di Kab Tanah Datar.
4. Untuk mengetahui Dampak Otonomi Daerah Terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti dapat di gunakan sebagai pedoman penelitian selanjutnya mengenai dampak otonomi daerah terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar
  - b. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai masalah pengangguran yang meningkat atau menurunnya angka pengangguran setiap tahun nya di Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kab Tanah Datar, penelitian ini dapat di jadikan pemahaman mengetahui akibat sekaligus dapat mengatasi masalah pengganguran di Kabupaten Tanah Datar.
- b. Bagi masyarakat menambah pengetahuan tentang dampak otonomi daerah terhadap penurunan angka pengganguran di Kabupaten Tanah Datar.